

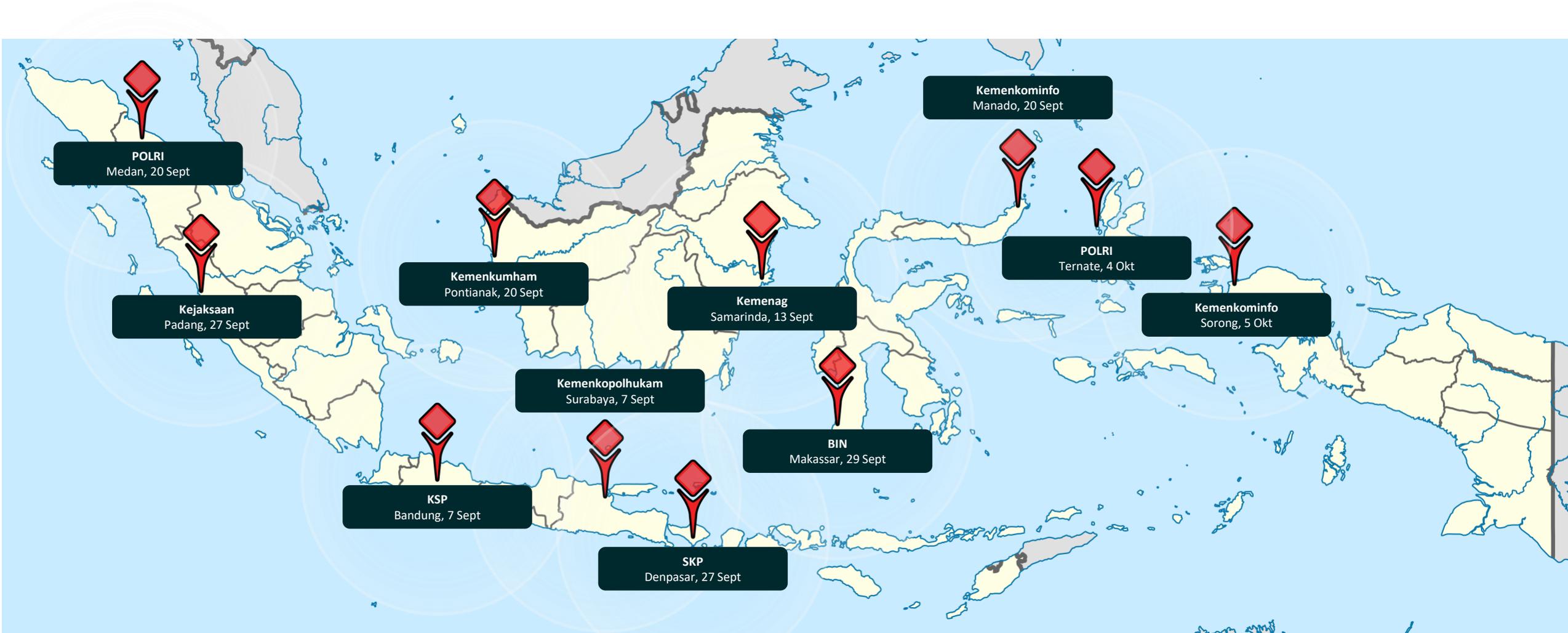
PERKEMBANGAN RUU KUHP





Dialog Publik RUU KUHP

Atas arahan Presiden RI dan didasari pada Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah menyelenggarakan dialog publik untuk menjamin *meaningful public participation* dalam pembentukan RUU KUHP



RUU KUHP

(Sebelum dan Sesudah Dialog Publik)

6 Juli 2022	9 November 2022
632 Pasal	627 Pasal

RUU KUHP versi 9 November 2022 mengadopsi 69 (enam puluh sembilan) **masukan masyarakat** dan **4 Proofreaders** terhadap Batang Tubuh dan Penjelasan dari Dialog Publik di 11 Kota

(terlampir dalam matriks)

MASUKAN MASYARAKAT



Penghapusan

Penggelandangan, unggas yang melewati kebun, ternak yang melewati kebun, dan 2 pasal tindak pidana lingkungan hidup



Reformulasi

- Menambahkan kata “kepercayaan” di pasal-pasal yang mengatur mengenai “agama”;
- Mengubah frasa “pemerintah yang sah” menjadi “pemerintah”;
- Mengubah penjelasan Pasal 218 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden;
- Dsb.



Penambahan

Menambahkan 1 (satu) pasal dan 1 (satu) ayat baru terkait penegasan beberapa tindak pidana dalam RUU KUHP sebagai tindak pidana kekerasan seksual



Reposisi

Tindak Pidana Pencucian Uang direposisi dari 3 pasal menjadi 2 pasal tanpa adanya perubahan substansi.

Dalam **Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI** yang diselenggarakan pada tanggal 9 November 2022, setelah mempertimbangkan masukan yang dipaparkan, Pemerintah mengusulkan untuk mengubah beberapa substansi, antara lain:

- ✓ Reformulasi **Penjelasan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat**
- ✓ Penyesuaian definisi **Makar** menjadi niat untuk melakukan serangan
- ✓ Mengadopsi ketentuan mengenai **rekayasa kasus** dalam Bab Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan, Bagian Penyesatan Proses Peradilan
- ✓ Perubahan jangka waktu berlaku RUU KUHP dari 2 tahun menjadi **3 tahun** setelah diundangkan
- ✓ Reformulasi Pasal mengenai **Penghinaan terhadap Lembaga Negara (dibatasi pada lembaga kepresidenan, MA, MK, MPR, DPR, DPD)**
- ✓ Pengecualian Penganiayaan Hewan dalam hal dilakukan untuk kegiatan **budaya/adat istiadat**.
- ✓ Harmonisasi **Pertanggungjawaban Korporasi** dengan Perma 13/2016

RDP Komisi III

9 Nov 2022



Rekap Daftar Inventarisasi Masalah

Fraksi	Jumlah DIM	Disepakati	Dibahas
F-PDIP	64	60	4
F-PG	72	49	23
F-P.Gerindra	3	0	3
F-P.Nasdem	n/a	n/a	n/a
F-PKB	63	55	8
F-PD	63	54	9
F-PKS	n/a	n/a	n/a
F-PAN	64	64	0
F-PPP	76	52	24



Terima Kasih